

Multinational Corporations (MNC) Perkebunan Kelapa Sawit Di Kalimantan Timur: Dampak Aspek Lingkungan, Sosial Budaya, dan Ekonomi.

Muhammad Risal

Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mulawarman

Abstract:

This paper aim to explain how Multinational Corporations/MNCs of palm oil industry have significant impact on the society's economy, culture, and environment where they live. From the analysis of the problem, it is found that palm oil MNCs presence have serious consequences on deforestation, natural disasters, threats to local wisdom, to widening gap of economy.

Keywords: *MNC, Palm Tree, East Borneo*

Abstrak:

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kehadiran sebuah perusahaan multinasional/MNC yang bergerak di bidang kelapa sawit memiliki dampak di bidang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Dari data dan analisis yang dilakukan diperoleh hasil bahwa kehadiran MNC kelapa sawit memiliki konsekuensi yang serius terkait dengan adanya lajunya deforestasi hutan, bencana alam, ancaman terhadap kearifan budaya lokal, hingga kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat yang bekerja sebagai buruh di perkebunan yang dimiliki oleh MNC-MNC tersebut di Provinsi Kalimantan Timur.

Kata Kunci : *MNC, Kelapa Sawit, Kalimantan Timur*

Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dimulai sejak tahun 1970 dan mengalami perkembangan pertumbuhan yang cukup cepat terutama periode tahun 1980-an. Pada tahun 1980 areal kelapa sawit hanya seluas 294 ribu ha dan terus meningkat dengan pesat sehingga pada tahun 2009 mencapai 7,32 juta ha, dengan rincian 47,81% berupa Perkebunan Besar Swasta (PBS), 43,76% perkebunan rakyat (PR), dan 8,43% Perkebunan Besar Negara (PBN). Dengan luas areal yang ada, Indonesia merupakan negara produsen minyak sawit terbesar di dunia. Pada tahun 2009, produksi minyak sawit Indonesia mencapai 20,6 juta ton, diikuti oleh Malaysia pada urutan kedua dengan produksi 17,57 juta ton. Pada tahun 2014, menurut data kementerian pertanian dan data yang ada di Index Mundi, jumlah total produksi minyak kelapa sawit Indonesia mencapai 31,5 juta dengan 21,5 juta ton di ekspor ke luar negeri. Sebagian besar hasil produksi minyak sawit di Indonesia merupakan komoditi ekspor. Pangsa ekspor kelapa sawit hingga tahun 2014 mencapai 80% dari total produksi. Negara tujuan utama ekspor kelapa sawit

Indonesia adalah India dengan pangsa sebesar 33%, Cina sebesar 13%, dan Belanda 9% dari total ekspor kelapa sawit Indonesia.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang ada di Pulau Kalimantan atau Pulau Borneo. Era pengembangan kelapa sawit di Kalimantan Timur dimulai pada tahun 1982 yang dirintis melalui Proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang dikelola oleh PTP VI. Untuk mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui gubernur terdahulu, Suwarna AF, telah mencanangkan program sejuta hektar lahan kelapa sawit di Kalimantan Timur. Perkebunan kelapa sawit menjadi primadona seiring manfaat positif pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Gubernur Kaltim saat ini, Awang Faroek Ishak, memimpikan Kalimantan Timur mampu melakukan upaya untuk mencapai kemandirian dan ketahanan pangan. Upaya dan kesungguhan dalam menggapai mimpi, yaitu “*Dreams come true*” program 1 juta hektare kelapa sawit jadi kenyataan. Bahkan waktunya lebih cepat tercapai dari yang telah diprediksi. Program Sejuta Hektare Sawit di Kaltim akhirnya benar-benar tercapai. Jika akhir 2012 luas areal kelapa sawit masih sekitar 961.802 hektare (ha) terdiri 226.765 ha tanaman plasma (rakyat) dan kebun inti 725.062 ha. Pada semester pertama 2013 luas tanam sudah mencapai 1.002.284 ha terdiri dari kebun inti 775.574 ha dan plasma 226.710 ha (www.kaltimprov.go.id, diakses 3 Februari 2015). Peningkatan realisasi lahan yang ditanami kelapa sawit diantaranya disebabkan oleh terbitnya moratorium perijinan sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan oleh Gubernur Awang Faroek Ishak. Terbitnya moratorium yang mewajibkan audit perijinan menyebabkan perusahaan memaksimalkan lahan-lahan yang dimiliki dan pemerintah untuk sementara tidak menerbitkan perijinan baru. Secara langsung maupun tidak langsung, moratorium ini telah memberikan hasil yang cukup baik bagi kemajuan kegiatan perkebunan sawit Kaltim.

Saat ini sudah jamak diketahui bahwa Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau yang menjadi paru-paru dunia karena keberadaan hutan tropisnya. Kalimantan Timur bersama Kalimantan Utara serta Negara Bagian Serawak Malaysia dan Brunei Darussalam bahkan membentuk sebuah kawasan di Pulau Kalimantan yang dinamakan *Heart Of Borneo*. Namun saat ini julukan sebagai paru paru dunia patut untuk dipertanyakan kembali mengingat bagaimana deforestasi dan perusakan hutan telah membuat sebagian besar kawasan di Kalimantan Timur berubah menjadi daerah yang gersang dan menjadi lahan perkebunan, terutama perkebunan sawit. Kehadiran perusahaan multi nasional yang memiliki konsesi penggunaan lahan yang sebelumnya hutan membuat laju perusakan hutan semakin cepat dan seolah tidak terkendali. Pembukaan lahan yang massif dan diganti dengan tanaman sawit yang dikenal tidak ramah lingkungan membuat kerusakan lingkungan yang bisa menimbulkan bencana dikemudian hari menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

Keberadaan *Multinational Corporations* (MNC) kelapa sawit adalah ancaman serius bagi Provinsi Kalimantan Timur jika tidak diimbangi dengan pengawasan regulasi yang ketat, karena dengan pembukaan lahan yang massif dan tak terkendali membuat banyak varietas lokal akan hilang, menyebabkan ketergantungan pada pupuk kimia dan pestisida serta keragaman hayati lokal dan ketahanan pangan yang akan melemah. Bencana ekologis akibat keberadaan perkebunan kelapa sawit juga tak dapat dihindari. Dari hasil penelitian dan survei di berbagai tempat secara langsung, perkebunan kelapa sawit sarat dengan masalah. Mulai dari pencemaran lingkungan hidup, pelanggaran HAM, kejahatan ekonomi, konflik antara perusahaan dengan penduduk lokal yang berkisar pada perampasan tanah juga penguasaan lahan penduduk. Pencemaran lingkungan, mulai dari tanah yang tidak dapat dipulihkan lagi keberadaannya karena kering, keras dan meranggas, pencemaran air yang menjadi sumber pokok hidup manusia. Sejarah, potensi dan peluang pembangunan perkebunan kelapa sawit mengindikasikan bahwa kelapa sawit masih mempunyai prospek positif ke depan, khususnya terkait dengan nilai tambah dan daya saing, dalam rangka pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dan berkeadilan. Namun, kelapa sawit juga menghadapi berbagai masalah/kendala terkait dengan teknologi, ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Masalah-masalah tersebut perlu diatasi supaya tidak mendistorsi daya saing produk-produk kelapa sawit Indonesia di pasar. Tulisan ini berupaya untuk menjelaskan bagaimana kehadiran perusahaan multinasional yang ada di Kalimantan Timur memiliki dampak di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat di sekitar kawasan yang menjadi konsesi lahan perkebunan yang dimiliki oleh MNC kelapa sawit.

Kehadiran *Multinational Corporations* (MNC) di Kalimantan Timur ***Multinational Corporations (MNC) dalam Ekonomi Global***

Ada banyak definisi dari *Multinational Corporations* (MNC), salah satunya definisi MNC yang diungkapkan oleh Caves bahwa MNC adalah perusahaan yang mengontrol dan mengelola produksi yang dilakukan oleh pabrik yang mereka miliki paling sedikit berada di dua negara. Dengan kata lain MNC meletakkan berbagai fasilitas produksi di berbagai negara dibawah kontrol dan manajemen dari struktur satu perusahaan. Oatley (Oatley, 2011) menambahkan bahwa MNC lebih banyak bergerak pada produksi ekonomi, perdagangan internasional dan investasi lintas batas. MNC muncul pertama kali dalam kaitan yang erat dengan ekonomi internasional semenjak abad ke 19. Gelombang pertama kemunculan MNC didominasi oleh Inggris. Perkembangan MNC dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Dengan bertambah banyaknya MNC ini juga membuat MNC memiliki peran yang penting dalam tatanan ekonomi global, yakni pada ekspor global serta memperkerjakan lebih dari 77 juta orang di seluruh dunia dan ikut bersumbangsih pada peningkatan GDP dunia (Oatley, 2011).

Kehadiran Perusahaan Multinasional (MNC) sebagai salah satu aktor utama dalam ekonomi politik global menimbulkan banyak perdebatan. Pihak yang pro melihat keberadaan MNC secara positif. Dunning dalam Oatley (2003) misalnya, menyatakan bahwa kehadirannya sangat penting menyangkut perannya dalam perdagangan global. MNC adalah agen utama globalisasi. Sebagai garda depan globalisasi, korporasi ini akan membuka kanal konektivitas, bisnis, investasi, dan perdagangan yang akan memberikan keuntungan bagi perekonomian, baik bagi MNC maupun negara dimana mereka melakukan produksi. Berbeda dengan argumen sebelumnya, pihak yang bisa digolongkan ke dalam “anti globalis” seperti Hiatt (2007) secara tegas menyebut bahwa korporasi besar atau MNC tersebut, dengan segala cara, ingin menguasai dunia untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini diamini oleh Rais (2008) yang mengutip pendapat Korten yang menyatakan bahwa korporasi besar tersebut melakukan langkah-langkah korporasinya untuk mengkolonisasi dunia. Salah satu argumen utama dari anti globalis ini adalah keberadaan MNC perlahan tapi pasti mulai menguasai perekonomian global dan mereduksi porsi ekonomi negara.

Collingsworth berpendapat (2006), bahwa MNC akan lebih memilih untuk mengembangkan dan memperluas sumberdaya mereka di sebuah negara berkembang yang memiliki halangan-halangan minimal. Hal ini tentu saja terkait dengan kemudahan-kemudahan mereka dalam menjalankan kegiatan produksinya di masa yang akan datang tanpa ada hambatan yang berarti. Selanjutnya, MNC diundang oleh pemerintah negara berkembang untuk menginvestasikan modal dan sumberdaya mereka, yang diasumsikan dan diharapkan akan menciptakan “*locomotive effect*” pada pertumbuhan dan kesejahteraan negara.

Menurut Oatley, banyak MNC yang sangat besar struktur perusahaannya, namun ada beberapa hal yang membedakannya dari perusahaan lainnya yakni dimana mereka membuat kebijakan perusahaan untuk mengorganisasi dan mengelola aktivitas internasionalnya sangat berbeda dari apa yang biasa dilakukan oleh perusahaan lainnya (Oatley, 2011). Kebijakan MNC dalam melakukan transaksi internasional di dalam pasar dipengaruhi oleh kondisi lingkungan ekonomi dimana mereka melakukan kegiatan produksi. Oatley secara ekonomi menjelaskan bagaimana kondisi lingkungan ekonomi bisa berdampak pada kebijakan perusahaan yang dipengaruhi oleh interaksi dari adanya dua faktor besar yakni keuntungan lokasi serta ketidaksempurnaan pasar.

Pertama, Keuntungan lokasi bagi MNC berasal dari karakteristik negara tertentu yang menyediakan berbagai kesempatan. Ada tiga karakteristik negara tertentu yang menjadi dasar keuntungan lokasi yang diperoleh MNC, yakni sumber daya alam yang besar, pasar lokal yang besar dan kesempatan untuk menambah efisiensi operasi perusahaan (Oatley, 2011). Sehingga

keuntungan lokasi inilah yang membuat perusahaan di suatu negara memiliki motivasi untuk melakukan transaksi ekonomi dengan negara lain.

Kedua, Ketidakefisienan pasar. Menurut Oatley ketidakefisienan pasar muncul ketika mekanisme harga gagal untuk memperkenalkan transaksi yang menguntungkan (Oatley, 2011). Ada dua perbedaan ketidakefisienan pasar yang membantu untuk memahami dua perbedaan tipe internasionalisasi. Yang pertama integrasi horisontal yang terjadi ketika perusahaan membuat fasilitas produksi yang terdiri dari berbagai bagian dan setiap bagian memproduksi barang yang sama baiknya. Pada ekonomi internasional, MNC yang berfokus pada integrasi horisontal memproduksi barang yang sama di berbagai pasar nasional. Yang kedua adalah integrasi vertikal yang merujuk pada dimana perusahaan melakukan transaksi internasional untuk barang menengah. Dari penjelasan Oatley dapat disimpulkan bahwa MNC hadir dalam sebuah negara bukan hanya akan memperhatikan karakteristik dari lingkungan dalam operasi perusahaannya tetapi kebanyakan, pembentukan MNC atau dalam konteks keberadaan MNC di Kalimantan Timur adalah berdasarkan keuntungan lokasi dan ketidakefisienan pasar.

Selain menjelaskan bagaimana MNC bisa hadir, Oatley juga menjelaskan bagaimana keterkaitan antara MNC dengan *Host Country* dimana MNC mendirikan dan menjalankan kegiatan produksi perusahaannya. Dalam kerangka ekonomi politik ada tiga kepentingan dari pihak yang berbeda terkait dengan keberadaan MNC, yaitu MNC, *Host Country* (negara dimana MNC menjalankan kegiatan produksinya atau menanamkan investasinya), dan *Mother/Home Country* (negara induk, pusat dimana MNC ini dibuat dan berasal). MNC adalah sebuah perusahaan yang ingin beroperasi dengan seminimal mungkin aturan yang membatasi, sementara *Host Country* berusaha mendapatkan keuntungan yang lebih dari keberadaan MNC. *Home Country* MNC menginginkan bahwa investasi yang ditanamkan melalui MNC di negara *Host Country* aman.

Multinational Corporations (MNC) Kelapa Sawit di Kalimantan Timur

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa keberadaan MNC di sebuah negara adalah berdasarkan keuntungan lokasi tempat dimana MNC akan menanamkan investasi dan melakukan kegiatan produksi serta ketidakefisienan pasar. Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal pengembangan dan pemberian konsesi lahan perkebunan sawit merupakan salah satu pilihan lokasi yang tepat, setidaknya dalam hal prospek ekspansi lahan yang masih terbuka luas, kondisi cuaca dan lingkungan yang mendukung produktifnya sawit dalam menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang menjadi bahan baku pembuatan *Crude Palm Oil* (CPO) serta biaya pembebasan tanah dan ongkos buruh yang murah.

Pemilihan lokasi konsesi perkebunan sawit di Kalimantan Timur dalam hal ini tidak terlepas dari adanya sejarah ekspansi sawit yang juga terlebih dahulu merambah di Benua Afrika namun tidak menghasilkan produktivitas yang diharapkan oleh MNC yang menanamkan investasi di sana. Menurut FAO, ada beberapa sebab mengapa produktivitas kebun sawit yang ada di Benua Afrika rendah padahal Benua Afrika adalah benua dimana kelapa sawit berasal. Pertama karena kualitas bibit yang rendah dan yang kedua adalah faktor musim kering yang berkepanjangan yang membuat kelapa sawit yang dikembangkan tidak mampu berproduksi secara maksimal karena kelapa sawit adalah salah satu tanaman yang memiliki kebutuhan air yang tinggi (Mardiyah Chamim, dkk, 2012:60). Berdasarkan pengalaman kegagalan ekspansi di Afrika, maka MNC kelapa sawit besar seperti Wilmar Internasional, London Plantations, perusahaan kelapa sawit Malaysia, dan beberapa MNC kelapa sawit kelas asia melihat potensi yang ada di Indonesia sebagai harapan untuk mengembangkan konsesi perkebunan dengan harapan produktivitas yang tinggi. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya klaim Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan bahwa ada sembilan juta hektare “tanah terlantar” yang siap dikembangkan menjadi kebun yang produktif. Sebuah klaim yang masih dipertanyakan validitasnya, mengingat data kepemilikan lahan yang ada di Indonesia masih tumpang tindih perizinannya (Mardiyah Chamim, dkk, 2012:60). Pengembangan lahan konsesi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini dapat kita lihat dari data yang tertera di Dinas Perkebunan Kalimantan Timur. Untuk detail lebih berapa luasan lahan perkebunan kelapa sawit yang ada di Provinsi Kalimantan timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Rekapitulasi Luas Areal, Produksi, dan Tenaga Kerja Kelapa Sawit Di Provinsi Kalimantan Timur

Tahun	Luas TM (Ha)	Luas Total (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (kg/Ha)	TKP (Orang)
2014	500.512	1.020.413	9.628.072	19.236	264.246
2013	397.635	944.826	6.901.602	17.357	309.370
2012	335.904	824.413	5.221.016	15.543	284.876
2011	279.568	716.320	4.081.782	14.600	277.382
2010	190.509	563.561	2.961.069	15.543	196.946

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2015)

Dari data yang tertera pada tabel, dapat dilihat peningkatan yang signifikan terhadap total luas lahan yang menjadi lahan konsesi perkebunan kelapa sawit baik yang dimiliki oleh MNC maupun yang dimiliki oleh negara. Wilayah kabupaten/kota yang memiliki luasan total yang paling besar berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan luasan total wilayah perkebunan sawit yang

ada mencapai 424.311 ha dan kapasitas produksi mencapai 5.694.529 ton. Untuk wilayah dengan konsesi yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan swasta besar juga berada di wilayah kabupaten Kutai Timur dengan total luas wilayah perkebunan yang dikuasai perusahaan swasta besar/MNC mencapai 331.433 ha. Hal ini menjadi sebuah hal yang wajar mengingat Kabupaten Kutai Timur memang menjadi barometer perkebunan kelapa sawit untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur bahkan sejak Gubernur Kalimantan Timur, Awang Farouk Ishak, menjadi bupati selama dua periode di sana.

Kehadiran perusahaan swasta asing atau dalam hal ini adalah MNC untuk berinvestasi di bidang perkebunan kelapa sawit tak terlepas dari sangat mendukungnya wilayah dan kondisi geografis yang ada di Kalimantan Timur. Banyaknya lahan gambut dan sungai menjamin ketersediaan air yang menjadi sumber kehidupan utama sawit yang sangat membutuhkan air untuk bisa berproduksi lebih maksimal. Selain itu metode pembukaan lahan yang berupa penebangan hutan dan pembakaran dianggap dapat memangkas biaya produksi karena lebih murah dan lebih mudah dilakukan. Padahal dalam prakteknya, pembukaan lahan dengan cara penebangan dan pembakaran dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan polusi udara.

Selain faktor kondisi geografis, maraknya perusahaan swasta asing atau MNC ini juga tidak terlepas dari murah biaya yang harus dilakukan untuk pembebasan lahan serta biaya buruh yang murah. Pembebasan lahan tanah yang murah disebabkan karena banyaknya lahan hutan yang bahkan termasuk dalam kawasan hutan lindung yang digunakan. Selain itu, banyak juga lahan yang dibuka merupakan lahan milik adat yang seharusnya masyarakat adat memiliki hak atas tanah ulayat tersebut. Pihak perusahaan asing yang membuka lahan tentu saja tidak peduli selama mereka memiliki izin untuk melakukan kegiatan konsesi penggunaan lahan untuk perkebunan. Hal ini terkait dengan aturan yang belum memadai (belum ada perda mengenai perkebunan berkelanjutan atau perda yang berkaitan dengan perkebunan sawit) serta lemahnya pengawasan pemerintah terhadap bagaimana cara atau sistem yang digunakan dalam pembukaan hutan. Hal ini juga yang menyebabkan dalam beberapa kasus pembukaan lahan terdapat penolakan dari sekelompok masyarakat adat yang merasa tanah adatnya diambil secara paksa.

Faktor buruh yang lebih murah juga menjadi alasan mengapa Kalimantan Timur menjadi pilihan oleh para MNC kelapa sawit. Murah upah tenaga buruh yang ada membuat para investor tertarik karena hal ini akan terkait dengan biaya produksi di bidang pengeluaran gaji yang dapat ditekan. Selain itu undang-undang perburuhan juga lebih banyak memihak kepada keberadaan investor. Buruh sawit yang dipekerjakan juga kebanyakan adalah

para buruh lepas yang hanya memiliki kontrak jarak pendek dan tidak mendapatkan asuransi sosial maupun biaya-biaya lainnya. Sebagai perbandingan pendapatan upah buruh dapat dilihat dari penghasilan buruh kelapa sawit yang ada di Indonesia dan di Malaysia. Buruh di perkebunan Malaysia rata-rata dapat mendulang uang hingga sekitar 900 ringgit atau Rp 3,2 juta per bulan. Sementara di Indonesia, para pekerja dengan tugas yang sama hanya mampu menghasilkan pendapatan sekitar 700 ringgit atau Rp 2,5 juta per bulan (<http://bisnis.liputan6.com>, 13 Maret 2015).

Dampak Kehadiran MNC di Provinsi Kalimantan Timur *Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati*

Perluasan pembukaan perkebunan kelapa sawit yang massif akan mengakibatkan perubahan fungsi lahan dan sumberdaya, perubahan luar biasa terhadap vegetasi dan ekosistem dari tanaman yang ada di lahan yang kebanyakan sebelumnya adalah hutan yang masih alami ataupun lahan gambut. Lingkungan menjadi bagian yang sangat rawan terjadi perubahan kerusakan lingkungan secara biofisik yang akan menyebabkan terdegradasi serta bertambahnya lahan kritis apabila dikelola secara tidak bijaksana.

Aspek kerusakan lingkungan mempunyai dimensi yang sangat luas pengaruhnya terhadap kualitas udara dan terjadinya bencana alam seperti kebakaran hutan, tanah longsor, naiknya permukaan air laut, banjir dan kemarau berkepanjangan akibat adanya perubahan iklim global. Hutan mempunyai fungsi ekologi yang sangat penting, antara lain, hidrologi, penyimpan sumberdaya alam genetika, pengatur kesuburan tanah hutan dan iklim serta sebagai penyimpan karbon. Selain itu, hutan juga berfungsi sebagai penyimpan keanekaragaman hayati. Hutan dan lahan gambut yang ada di Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu hutan tropis dengan fungsi ekologis dan penyimpan keanekaragaman hayati yang sangat beragam jumlahnya dan bahkan ada yang bersifat endemik atau hanya dapat ditemui di wilayah hutan hujan tropis yang ada di Pulau Kalimantan.

Kerusakan dan degradasi hutan menyebabkan perubahan iklim dengan dua cara. Pertama, menggunduli dan membakar hutan melepaskan karbondioksida ke atmosfer dan kedua, wilayah hutan yang berfungsi sebagai penyerap karbon berkurang. Kerusakan hutan yang ada di Kalimantan Timur yang diakibatkan oleh adanya pembukaan lahan perkebunan sawit yang dimiliki oleh para MNC kelapa sawit biasanya dilakukan dengan cara melakukan kegiatan pembakaran hutan maupun lahan gambut yang ada. Hal ini dilakukan karena dengan melakukan pembakaran lahan yang akan digunakan sebagai media tanam kelapa sawit merupakan cara yang paling murah dan efektif. Namun hal ini tentu saja memiliki dampak yang sangat merugikan dan sangat merusak

lingkungan karena akan mematikan banyak keanekaragaman hayati, termasuk jenis tanaman yang bersifat endemik.

Selain itu pembakaran lahan juga menyebabkan terjadinya bencana kabut asap yang sangat mengganggu jarak pandang dan berperan besar dalam kasus peningkatan penderita infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). Bencana kabut asap akibat pembakaran juga menyumbang peranan yang besar dalam peningkatan karbondioksida yang ada di atmosfer yang akan berkorelasi terhadap efek gas rumah kaca dan pemanasan global. Menurut data yang ada di BNPB pada 27 September 2014, Jumlah Hotspot NOAA yang tercatat di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut: 71 Titik - Kota Mahakam Ulu, 1 Titik - Kab. Nunukan, 1 Titik - Kab. Malinau, 6 Titik - Kab. Bulungan, 15 Titik - Kab. Berau, 30 Titik - Kab. Kutai Timur, 6 Titik - Kab. Kutai barat, 26 Titik - Kab. Paser (BNPB, 2015). Dari data yang ada dapat dilihat bahwa titik hot spot kebakaran hutan berada di wilayah kabupaten yang menjadi basis perkebunan kelapa sawit dimana di wilayah-wilayah tersebut, perkebunan kelapa sawit dikelola oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang kebanyakan memiliki kantor di luar negara Indonesia.

Untuk lahan perkebunan sawit yang sudah beroperasi, kegiatan-kegiatan seperti aktivitas pemupukan, pengangkutan hasil, termasuk juga pengolahan tanah dan aktivitas lainnya, secara akumulatif akan mengakibatkan tanah mengalami penurunan kualitas (terdegradasi), karena secara fisik akibat kegiatan tersebut mengakibatkan tanah menjadi bertekstur keras, tidak mampu menyerap dan menyimpan air. Penggunaan bahan kimia dalam kegiatan perkebunan akan meninggalkan residu di dalam tanah. Demikian juga dengan pemupukan yang biasanya menggunakan pupuk kimia dan kurang menggunakan pupuk organik akan mengakibatkan pencemaran air tanah dan peningkatan keasaman tanah. Tanaman kelapa sawit juga merupakan tanaman yang rakus air. Ketersediaan air tanah pada lahan yang menjadi perkebunan kelapa sawit tersebut akan semakin berkurang. Hal ini akan mengganggu ketersediaan air, tidak hanya bagi manusia namun bagi tanaman itu sendiri. Dengan berkurangnya kuantitas air pada tanah dapat menyebabkan para petani akan sulit mengembangkan lahan pertanian pasca lahan perkebunan kelapa sawit ini beroperasi. Jika dibiarkan tanpa antisipasi atas dampak jangka panjang, maka lahan demikian akan menjadi terlantar dan pada akhirnya akan menjadi lahan kering juga gersang yang terbengkalai. Salah satu wilayah yang mengalami kekeringan cukup hebat adalah Kabupaten Kutai Timur termasuk di wilayah Karangan, Sangkulirang dan membentang hingga sampai ke Talisayan, Kabupaten Berau dimana terdapat perkebunan sawit yang dioperasikan oleh PT. Multi Pacific International (Karangan), PT. Etam Bersama Lestari (Sangkulirang), dan PT. Tanjung Buyu Plantations (Talisayan). Di kabupaten Paser pun mengalami hal yang serupa. Menurut

Abdullah, salah satu penduduk lolal yang ada di sana, untuk menggali sumur sebelum ada perkebunan sawit merupakan hal yang mudah karena tidak sampai lima meter sudah menemukan air. Sekarang harus menggali lebih dalam hingga 10-15 meter sampai bertemu sumber air (Mardiyah Chamim, dkk, 2012:25).

Peran hutan dalam fungsi mengatur iklim sangat penting sehingga jika pembukaan lahan hutan untuk perkebunan sawit di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan secara massif akan menghancurkan hutan tropis yang ada, sehingga upaya Indonesia dalam memerangi perubahan iklim akan menjadi sia-sia. Budidaya tanaman kelapa sawit menerapkan sistem monokultur yang mensyaratkan pembersihan awal pada lahan yang akan digunakan (*land clearing*). Secara ekologis, pola monokultur lebih banyak merugikan karena pengkhususan jenis tanaman (kelapa sawit) akan berdampak pada penghilangan (atau pengurangan tanaman lain).

Selain berdampak secara ekologis, keberadaan perkebunan kelapa sawit juga mengancam kelangsungan hidup dari primata yang berasal dari hutan Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Sebuah kasus yang terjadi pada tahun 2011 menjadikan keberadaan perkebunan sawit menjadi sorotan tajam dari pemerhati lingkungan dan satwa liar. Hal ini tidak terlepas dari ditemukannya tulang belulang orang utan (*Pongo pymaeus mario*) di hutan Kutai Kartanegara. Spesies langka ini merasa terpojok dengan ekspansi kebun sawit milik PT. Khaleda Agropriya Malindo, anak perusahaan Metro Kajang Holding Bhd. Kasus ini terungkap setelah Markas Besar Kepolisian RI mendapat laporan ditemukannya tulang belulang orang utan yang mati akibat disiksa habis-habisan. Perusahaan ini mengantongi izin untuk membuka lahan hutan seluas 16 ribu hektar untuk menjadi kebun sawit. Arealnya menjangkau hutan yang menjadi habitat bagi 200 ekor orang utan. Akibat dari terdesaknya habitat mereka, orang utan ini mencari makan dengan cara memakan pucuk-pucuk pohon sawit. PT. Khaleda dalam upayanya memberantas orang utan yang dianggap sebagai hama ini menggunakan cara melibatkan penduduk lokal yang disewa untuk berburu orang utan. Setiap ekor orang utan yang berhasil ditangkap dihargai dengan upah satu juta rupiah (Mardiyah Chamim, dkk, 2012:24).

Masuknya para orang utan ini ke kawasan perkebunan milik perusahaan menunjukkan bahwa ada yang salah dalam hal pengelolaan dan sistem pengawasan pembukaan lahan perkebunan sawit yang mengganggu kehidupan dan ekosistem lingkungan yang menjadi habitat orang utan tersebut. Orang utan akan mencari alternatif tempat mencari makanan karena hutan tempat tinggal mereka menjadi lahan perkebunan dan orang utan ini tentu saja

memilih untuk mencari makan di tempat terdekat yang tidak lain adalah lahan perkebunan milik perusahaan kelapa sawit.

Ekonomi

Perekonomian suatu daerah yang dimasuki oleh suatu investasi besar sudah bisa dipastikan akan berkembang dengan pesat. Hal ini dapat dilihat di beberapa daerah yang menjadi lokasi perusahaan besar seperti di daerah Riau yang berkembang pesat melalui investasi perusahaan perkebunan, *pulp and paper*, perusahaan HPH, dan lain-lain. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi perkebunan sebagai penghasil minyak kelapa sawit/CPO dan inti kelapa sawit (CPO) yang merupakan salah satu sumber penghasil devisa non-migas bagi Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu wilayah yang menyumbang devisa dari ekspor minyak kelapa sawit. Cerahnya prospek komoditi minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak (*biodiversity*) nabati dunia telah mendorong Pemerintah Indonesia untuk memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawit. Perkembangan sub-sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak lepas dari adanya kebijakan pemerintah yang memberikan berbagai insentif untuk kemudahan pemberian izin.

Dalam perekonomian Indonesia maupun dalam konteks Kalimantan Timur, komoditas kelapa sawit memegang peran yang cukup strategis karena komoditas ini mempunyai prospek yang cukup cerah sebagai sumber devisa maupun sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Disamping itu minyak sawit merupakan bahan baku utama minyak goreng yang banyak dipakai di seluruh dunia, sehingga secara terus menerus mampu menjaga stabilitas harga minyak sawit. Komoditas ini mampu pula menciptakan kesempatan kerja yang luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data yang ada pada tabel sebelumnya, bidang perkebunan kelapa sawit mampu menyerap hingga 264.246 tenaga kerja. Namun hal ini tentu saja bukan menjadi ukuran bahwa pekerjaan ini sebagai sebuah pekerjaan yang memberikan penghasilan yang tetap dan tinggi karena upah yang diperoleh para pekerja atau buruh di bidang ini tidak sesuai dengan kerja keras yang dilakukan.

Peningkatan luas lahan perkebunan kelapa sawit di Kaltim itu juga berdampak terhadap nilai ekspor non migas dan perolehan devisa dari ekspor CPO pada 2013 mencapai 1,26 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp12,659 triliun. Menurut Kepala Dinas Perkebunan Kaltim, Etnawati Usman, apabila kondisi di Kaltim selalu kondusif untuk berinvestasi, maka di akhir 2018, sektor perkebunan terutama sawit bisa menjadi tulang punggung dalam upaya transformasi ekonomi berbasis sumberdaya alam terbarukan. Kebun sawit yang sudah menghasilkan CPO itu tersebar di tujuh kabupaten di Kaltim, antara lain Berau, Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara, sedangkan

yang terluas berada di Kutai Timur dan Kabupaten Paser (www.antarakaltim.com, 16 Maret 2015).

Jika dilihat secara makro, pendapatan daerah ataupun nilai ekspor yang diperoleh dari sektor sawit ini memang sangat menarik dan menjanjikan. Namun perlu untuk diketahui bahwa itu hanyalah sebatas angka yang sebagian besar masuk ke dalam kantong pemilik perkebunan sawit yang dalam hal ini adalah MNC-MNC yang memiliki lahan konsesi tersebut. Namun jika dilihat dari sisi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan perkebunan sawit tentu kita akan mendapati hal yang jauh berbeda. Perubahan bentang alam terutama hutan, lahan, badan air, danau dan sungai menutup, membatasi dan mengurangi kemampuan dan akses masyarakat adat pedesaan dan petani dalam meneruskan dan memelihara anugerah alam yang selama ini menjadi alat dan faktor yang menjadi sumber mata pencaharian, pangan dan papan mereka. Hal inilah yang tidak dilihat oleh MNC yang hanya memikirkan keuntungan semata. Di beberapa tempat dimana perkebunan sawit berada, seperti kawasan Paser, Kutai Barat, Kutai Timur dan Kutai Kartanegara yang masyarakatnya biasa menggantungkan hidup dari hasil hutan dan sungai, harus berjuang lebih keras lagi dalam hal memenuhi kebutuhan hidup karena sumber mata pencaharian mereka tergerus oleh keberadaan perkebunan kelapa sawit.

Sosial Budaya

Perubahan bentang alam yang diakibatkan oleh pembukaan lahan kelapa sawit dan adanya kegiatan produksi sangat berpengaruh besar terhadap kondisi dan kehidupan sosial masyarakat akibat penguasaan dan persaingan yang semakin mengurangi dan merubah secara paksa jati-diri, kebiasaan dan kearifan masyarakat seperti berkurang atau tertutupnya hak dan akses terhadap lahan hutan, mata pencaharian, nilai budaya dan agama, mobilisasi tenaga kerja dari luar dengan hadirnya perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Dampak budaya bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya mengalami perubahan, degradasi dan bahkan kepunahan kearifan lokal, tradisi, seni, nilai dan praktek kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada hutan, sungai, danau dan bentang alam lainnya. Di sebagian wilayah Kalimantan Timur pun mengalami hal yang sama. Kehidupan sosial budaya masyarakat berubah drastis sejak kedatangan para investor kelapa sawit yang mengakuisisi lahan hutan dimana mereka biasa mencari sumber mata pencaharian.

Sebuah fakta di lapangan menunjukkan hal yang miris. Hal ini berdasarkan dari pengakuan salah satu tokoh dari Suku Dayak Muluy yang berada di Paser. Menurut pengakuan Jahan, tokoh adat Suku Dayak Muluy, biasanya mereka mencari rotan di hutan untuk dibikin kalung, tas, gelang dan keranjang.

Namun hal tersebut kini tidak dapat lagi dilakukan. Selain rotan, mereka juga kesulitan untuk mencari tanaman buat obat. Para tabib (*sikerei* dalam bahasa Dayak Maluy) kehilangan harta karun paling berharga mereka, yaitu ribuan spesies tanaman hutan yang punya daya hidup dan daya sembuh. Tanah dan hutan, bagi masyarakat adat adalah perpustakaan dan sumber hidup, tempat mereka memperoleh dan menyimpan kembali kearifan dan pengetahuan lokal mengenai budaya pengobatan tradisional yang terjaga erat dari generasi ke generasi (Mardiyah Chamim, dkk, 2012:195-196). Masyarakat adat juga kehilangan kendali diatas tanah ulayat mereka. Pada tahun 1999, ketika perkebunan sawit belum seagresif sekarang dalam melakukan ekspansi, masyarakat adat di daerah Jempang, Muara Pahu, dan Bongan, Kalimantan Timur, mengeluhkan penghancuran kuburan nenek moyang mereka oleh perusahaan London Sumatera Plantation (Mardiyah Chamim, dkk, 2012:201).

Kesimpulan

Kehadiran perusahaan multinasional/MNC kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur merupakan sebuah konsekuensi dari adanya globalisasi dimana MNC termasuk salah satu bagian utama dari hal tersebut. Kehadiran MNC ini tidak terlepas dari sangat strategisnya posisi Kalimantan Timur dari sudut pandang Investor kelapa sawit untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit dengan hasil produksi yang maksimal. Hal ini juga didukung oleh keinginan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit sebagai sebuah komoditas unggulan untuk menghasilkan devisa dan pendapatan daerah dari bidang non-migas. Kehadiran MNC ini tidak hanya memiliki dampak secara ekonomi saja, namun juga memiliki dampak terhadap lingkungan dan aspek sosial budaya dimana dampak yang dihasilkan merupakan dampak yang memiliki konsekuensi terhadap kerusakan lingkungan, bencana alam, ketimpangan pendapatan akibat upah buruh yang murah, serta hilangnya norma-norma kearifan budaya lokal masyarakat yang berada di sekitar areal perkebunan sawit. Hal ini tentu saja harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah jika tidak ingin menuai masalah yang lebih besar di kemudian hari, khususnya untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Daftar Pustaka

- Chamim, Mardiyah, dkk. 2012. *Raja Limbung: Seabad Perjalanan Sawit di Indonesia*. Jakarta: Diterbitkan atas kerjasama Insist Press, Tempo Institute, Sawit Watch, dan Desa Sejahtera.
- Collingsworth, Terry. (2006) "Beyond Public Relations: Bringing The Rule Of Law To Corporate Codes Of Conduct In The Global Economy", *Corporate Governance*, Vol. 6 Iss: 3, pp.250 – 260.
- Hiatt, Steven (ed). 2007. *A Game as Old as Empire: The Secret World of Economic Hit Men and the Web of Global Corruption*. San Fransisco: Berrett Koehler Publishers.
- Oatley, Thomas. 2003. *International Political Economy: Interest and Institutions in Global Economy*. London: Longman.
- _____. 2011. *International Political Economy Interests and Institutions in the Global Economy*. New York: Pearson Education Inc.
- Rais, Mohammad Amin. 2008. *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia*. Blimbing Sari: PPSK Press.
- TUK Indonesia. 2015. *Kuasa Taipan Kelapa Sawit di Indonesia*. Jakarta: TUK Indonesia.

Situs Online

- Amelie, Siska. *Upah Tinggi Bukan Alasan Utama TKI Cari Kerja di Malaysia*. <http://bisnis.liputan6.com/read/2042867/upah-tinggi-bukan-alasan-utama-tki-cari-kerja-di-malaysia> diakses pada tanggal 15 Maret 2015.
- BNPB Pusat. *Data Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan 2011-2015*. <http://geospasial.bnpb.go.id/pantauanbencana/data/datakbhutanall.php> diakses pada tanggal 16 Maret 2015.
- Masud, Masna. *Agribisnis Kelapa Sawit Lokomotif Baru Perekonomian Kaltim* <http://www.antarakaltim.com/berita/20410/agribisnis-kelapa-sawit-lokomotif-baru-perekonomian-kaltim> diakses pada tanggal 16 Maret 2015.